

Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

Laila azmi

Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
azmilaila70@gmail.com

Syamsul Muarif Batubara

Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
syamsulbatubara2245@gmail.com

Cerah Hati

Uin Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
cerahhati83@gmail.com

Abstract

The reform process brought changes in various aspects of the lives of Indonesian citizens. Indonesia became a democratic country which was marked by the direct election of the president and regional heads by the people. The consequence of this is that Indonesian citizens are required to understand politics, one thing that can be done is through political education. The implementation of political education aims to educate, as well as develop and motivate the younger generation to be politically literate. However, the reality now is that Indonesian citizens have not received maximum political education, their political knowledge is still so lacking that they are only used as political commodities by certain groups. This shows that the government and political parties who are responsible for implementing political education still have a less than optimal role. Political education that does not run well will result in the implementation of democracy being ineffective and even potentially giving rise to sectoral conflicts.

Keywords: Implementation of Political Education, Increasing Political Awareness

Abstrak

Proses reformasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia, Indonesia menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Konsekuensi dari hal tersebut ialah warga negara Indonesia dituntut harus paham terhadap politik, salah satu yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan politik. Pelaksanaan Pendidikan politik bertujuan untuk mendidik, serta mengembangkan dan memberikan motivasi kepada generasi muda agar melek politik. Namun kenyataannya sekarang, warga negara Indonesia belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal, pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga hanya dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu. Hal ini menunjukkan pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik perannya masih kurang maksimal. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan konflik sektoral.

Kata Kunci: Implementasi Pendidikan Politik, Meningkatkan Kesadaran Politik

Pendahuluan

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang unik jika dibanding dengan Negara lain di belahan dunia ini. Keunikan ini antara lain meliputi sejarah pra kolonialisme Belanda (masa kejayaan Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, Mataram Islam) masa penjajahan, masa perjuangan melawan penjajah, perjuangan menegakkan kemerdekaan, perjuangan mengisi kemerdekaan. Masing-masing masa memiliki romantisme kehidupan atau perjuangan yang berbeda karena memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda pula sesuai dengan masanya.

Pada masa kolonialisme ditandai dengan pengurasan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alamnya untuk kepentingan penjajah. Pada masa perjuangan

melawan penjajah tumbuh jiwa patriotisme, rela berkorban yang luar biasa untuk menghadapi penjajah. Pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan tumbuh rasa patriotisme, rela berkorban dan kebersamaan yang sangat kuat. Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Masa reformasi menjadi tonggak pembenahan kembali semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi mulai memberikan penyadaran kepada setiap insan untuk memulai menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan jiwa dan semangat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan untuk mencapai cita-cita nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka segenap warga negara Indonesia diwajibkan untuk dapat mengerti tentang politik agar dapat berperan aktif dalam dunia politik tidak hanya sekedar objek politik sesaat demi mencapai suatu ambisi dari golongan tertentu.

Partai politik (parpol) yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Fungsi parpol sebagaimana disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Setiap masa akan melahirkan kader bangsa yang akan memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kader bangsa tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses kaderisasi sesuai dengan problem dan tantangannya. Kader-kader bangsa inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan tetap tegak dan eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan masyarakat global. Mereka akan membela Negara dalam menghadapi problem ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam.

Politik dan pendidikan politik dan pendidikan saling terkait karena pendidikan merupakan instrumen yang kuat untuk

membentuk sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik individu dan masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berpikiran kritis, memiliki pengetahuan politik yang memadai, dan memahami sistem politik yang mereka jalani. Pendidikan politik juga berkontribusi pada partisipasi politik yang lebih aktif dan demokratis. Kekuasaan dalam pendidikan kekuasaan memainkan peran penting dalam pendidikan, karena kontrol atas pendidikan memberi pengaruh besar pada kepemilikan pengetahuan, nilai-nilai, dan pembentukan identitas.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab maupun sebagai pemimpin politik. Aspek demokrasi. Hakikat pendidikan politik erat kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan politik memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi, sistem politik, hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, serta nilai-nilai partisipasi aktif dalam kehidupan politik masyarakat. Penguatan kewarganegaraan: Pendidikan politik bertujuan untuk memperkuat kewarganegaraan aktif dan bertanggung jawab.

Kurangnya sosialisasi maupun pendidikan politik pada masyarakat mengakibatkan masyarakat pemilih maupun masyarakat pendukung tidak dewasa dalam mengikuti dan menyikapi proses demokrasi. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan berdampak menimbulkan konflik yang mengakibatkan stabilitas keamanan akan terganggu dan kemungkinan berpotensi untuk menuju ke arah disintegrasi bangsa, sehingga demokrasi yang diharapkan akan membuat kemajuan bagi bangsa Indonesia malah menghancurkan bangsa Indonesia itu sendiri.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan demikian penelitian deskriptif ini bertujuan memperoleh gambaran yang seutuhnya mengenai suatu hal yang menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian deskriptif ini berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat dan kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan atau menjelaskan Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengertian Pendidikan Politik

Sherman dan Kolker menjelaskan: "Pendidikan kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan internalisasi nilai-nilai, proses dimana individu mempelajari suatu budaya dan menjadi bagian dari budaya itu sebagai elemen penting dari citra dirinya. ke: Hal ini melibatkan pembelajaran pada usia muda tentang nilai-nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang membentuk sifat manusia.

Sedikit banyak, pandangan di atas sejalan dengan pendapat Plano bahwa "sosialisasi politik adalah proses pembelajaran". Melalui proses ini, individu diharapkan memperoleh orientasi berupa keyakinan, emosi, dan nilai-nilai terhadap pemerintahan dan organisasi politik. Aku akan melindungi hidupmu. "Pendidikan politik memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam kelangsungan hidup dan reproduksi organisasi politik dan dalam politik. " Kehidupan dalam suatu negara. Melalui kegiatan pendidikan politik, para anggota organisasi politik mendapat transmisi nilai-nilai dan warisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang sebelumnya berkecimpung dalam politik, termasuk mereka yang tidak berpartisipasi langsung dalam partai politik.

Kantlapuraweera memandang pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik, yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Dari perspektif ini, pendidikan

kewarganegaraan merupakan suatu cara untuk melibatkan masyarakat dalam sistem politik dengan berpartisipasi dalam mengkomunikasikan tuntutan dan dukungan mereka.

Pengetahuan politik membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang baik membuat seseorang lebih aktif dalam kancah politik, begitu pula sebaliknya. Dalam sistem politik, aspek pengetahuan saja tidak cukup; kombinasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan harus dikembangkan bersama-sama. Ketiganya dianggap menjadi urat nadi pendidikan politik bangsa.

Holdal dan Zakharchenko menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan publik, suatu upaya untuk melibatkan warga negara dalam komunitasnya dan menciptakan budaya partisipasi. Konsep pendidikan politik dari sudut pandang sarjana Jerman Giesecke. Menurut Giesecke, pendidikan politik dapat dipahami dalam arti sebagai `pengetahuan pendidikan, pengetahuan terarah, pengetahuan perilaku, pengetahuan perilaku. R. Hajer memandang pendidikan politik sebagai upaya membentuk masyarakat menjadi agen politik yang bertanggung jawab. Politik kini dipahami sebagai proses penggunaan kekuasaan untuk menegakkan aturan dan keputusan dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pendidikan politik merupakan salah satu bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda dengan cara melatih kader-kader politik untuk bersaing dalam politik dan mencari solusi politik untuk menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pengertian pendidikan politik yang sempit yang ditujukan kepada kader partai atau kader politik.

B. Implementasi Program Pendidikan Politik

Implementasi program pendidikan politik. Implementasi merupakan turunan dari kebijakan publik, dan Anda bisa mengetahui kapan implementasi akan terjadi langsung dari program pendidikan politik ini. Implementasi sendiri merupakan suatu proses pencapaian tujuan politik melalui langkah-langkah administratif dan politik. Berhasil atau tidaknya suatu implementasi dapat dievaluasi dari segi kemampuan sebenarnya untuk melanjutkan atau melaksanakan program yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan, dimana ditetapkan bahwa kebijakan yang dikembangkan pemerintah melalui Bakesbanpol benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil mencapai luaran dan hasil yang direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan terjadi sebagai keluaran langsung dari kebijakan tersebut. Hasil biasanya terlihat dalam waktu singkat setelah implementasi kebijakan. Hasil merupakan dampak kebijakan yang diharapkan terjadi setelah keluaran kebijakan dipublikasikan. Hasil biasanya diukur lama setelah hasil dipublikasikan atau kebijakan diterapkan.

Implementasi merupakan proses yang sangat penting dan esensial dalam kebijakan. Sebab kita berhadapan langsung dengan generasi muda yang menjadi penerima kebijakan ini. Generasi muda saat ini sangat membutuhkan pengetahuan tentang pentingnya politik bagi kehidupan mereka di masa depan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu sarana pengembangan karakter generasi muda. Penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Namun kenyataannya, sejak dini kita sudah bisa merasakan pembelajaran pendidikan, pendidikan kewarganegaraan yang sengaja bertujuan untuk sosialisasi politik.

Penyelenggaraan pendidikan politik membawa tiga tujuan dalam pengembangan pendidikan politik. Pertama pembentukan kepribadian politik, kedua kesadaran politik, dan ketiga partisipasi politik. Kepribadian politik dipahami sebagai sikap individu terhadap permasalahan politik dan menentukan tingkat kesadaran politik individu. Hal ini dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan. Untuk membantu individu yang menghadapi masalah politik menjadi peserta aktif dalam situasi seperti itu. Tingkat partisipasi warga negara dan kaum intelektual akan dikorelasikan dengan kualitas demokrasi dan produk-produknya, seperti peraturan perundang-undangan yang tepat mengenai kualitas pelayanan publik.

Mengacu pada pembahasan di atas dan Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain disposisi (sikap pelaksana), serta kecenderungan perilaku dan karakteristik pelaksana kebijakan yang dapat berperan penting dalam implementasi kebijakan jernih. Implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Namun temuan pada bidang program

kegiatan yang menjadi kebijakan Bakesbanpol adalah belum adanya tindak lanjut untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelaksanaan program.

Dalam hal ini, pelaksana atau pelaksana kebijakan harus menunjukkan integritas dan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam melaksanakan pendidikan politik, selalu ada persoalan yang menimpa semua individu. Jika dicermati, faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program ini adalah generasi muda sebagai penerima kebijakan pendidikan politik.

C. Tujuan Pendidikan Politik

Dalam UURI No. 2 tahun 2008 pasal 31, bahwa yang menjadi tujuan pendidikan politik, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, secara lebih luas pendidikan politik diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Pendidikan politik sebagai pembentukan karakter bangsa.
Dengan kata pendidikan mengandung suatu tindakan manusiawi. Suatu tindakan yang bermaksud untuk mengubah pikiran, sikap dan perilaku manusia ke arah yang menunjukkan kedewasaan. Soemantri dalam Hermawan menjelaskan bahwa pendidikan politik yang mengarahkan pada pembentukan karakter bangsa merupakan tahap awal bagi suatu bangsa yang memperoleh kemerdekaan. Pendidikan politik dalam pembentukan karakter bangsa juga ditegaskan dalam UU RI No 2 tahun 2008 bahwa salah satu tujuan partai politik adalah meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pendidikan politik sebagai pembangunan kesadaran berpolitik.

Hal ini juga disebutkan dalam UU No.2 Tahun 2008 bahwa tujuan parpol adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun kesadaran berpolitik dimaksudkan adalah proses penyadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya.

3. Pendidikan politik sebagai pembinaan kader parpol.

Dalam upaya melahirkan kader parpol yang handal dan berkualitas memang diperlukan sistem pengkaderan yang efektif dan produktif. Pendidikan politik sangat strategis dalam kerangka pembinaan tersebut. Firmanzah dalam menyoroti tentang peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan dalam dua hal, pertama peran dan tugas internal organisasi dan kedua parpol juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi.

4. Pendidikan politik sebagai penanaman ideologi kebangsaan.

Setiap parpol memiliki ideologi yang dianutnya. Baik itu ideologi keagamaan, kebangsaan, kekaryaan, dan komunisme. Ideologi yang dianut oleh parpol sangat penting karena menggambarkan visi, misi, dan tujuan parpol yang ingin dicapai. Ideologi dalam kaitan politik atau dikenal dengan ideologi politik adalah suatu perumusan keyakinan atau program yang dimiliki oleh suatu negara, suatu bangsa, partai politik atau perkumpulan politik lain yang bermaksud mencapai tujuan politik yang khusus.

Jika partai politik tidak melaksanakan pendidikan politik (sosialisasi dan rekrutmen politik) secara efektif dan akurat, maka akan sangat sulit tercapainya pendidikan politik di kalangan masyarakat, dan dengan sendirinya sikap apatis politik akan semakin meningkat. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (abstain) baik pada pasca konflik maupun pemilukada. Masyarakat menilai tidak ada manfaatnya bagi mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Keadaan ini tentu saja berbahaya bagi kelangsungan negara, karena tidak hanya membatalkan praktik demokrasi, namun juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok atau faksi tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan semakin menyebarkan praktik korupsi.

D. Landasan Pendidikan Politik di Indonesia

Landasan utama penyelenggaraan pendidikan politik adalah Pancasila, UUD 1945, dan Janji Pemuda 1928. Karena Pancasila merupakan dasar filsafat, pandangan hidup, dan politik, maka Pancasila dijadikan landasan utama dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Bangsa Indonesia, memberikan jati diri pada bangsa Indonesia. Identitas inilah yang harus digali oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar mereka benar-benar memahami karakter diri, potensi kekuatan dan kelemahannya, sehingga mampu menghadapi permasalahan kehidupan dan tantangan global.

UUD 1945 merupakan landasan konstitusi yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan dengan harapan agar bangsa Indonesia khususnya generasi muda semakin memahami hak dan kewajibannya serta menjadi warga negara yang sadar dan taat hukum. Melalui tangan bersih dan jujur generasi muda diharapkan dapat membangun Indonesia yang mandiri, bersatu, berdaulat, berkemajuan, adil dan makmur.

Sumpah Pemuda 1928 menjadi wadah politik, karena semangat persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan pantang menyerah yang ditempa Pemuda 1928 dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Persaudaraan semoga bisa mewujudkan Indonesia jaya di milenium ketiga. Selain Pancasila, UUD 1945, dan Janji Pemuda 1928, dua pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Binneka Tunggal Ika.

E. Persoalan-persoalan dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik

Pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan secara merata di seluruh masyarakat, dan secara merata di kalangan generasi muda, khususnya pemilih pemula. Namun masih terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaannya sendiri yang belum dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Persoalan-persoalan yang ada tersebut tentunya menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik dan pastinya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi generasi muda maupun masyarakat.

1. Kurangnya Partisipasi Generasi Muda

Generasi muda saat ini memiliki partisipasi politik yang sangat sedikit. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bagi elite politik. Generasi muda ini cenderung apatis dan acuh terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan permasalahan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah saat ini. Peran generasi muda masih kurang, baik dalam penyelenggaraan pemilukada maupun dalam bentuk partisipasi itu sendiri. Permasalahan yang menimpa generasi muda saat ini adalah semua generasi muda saat ini masih takut untuk bergabung dengan partai politik, atau setidaknya untuk bergabung dengan partai politik. Akibatnya muncul headline tentang partai politik dan politik yang buruk di mata masyarakat, terutama generasi muda yang belum mengetahui secara pasti apa itu politik. Faktor manusia, yaitu tekanan orang tua yang menghalangi anak untuk ikut serta dalam politik yang lebih dalam, tidak dapat disangkal. Hal ini menunjukkan bahwa politik sendiri ibarat bumerang yang patut dihindari. Situasi saat ini juga bisa disebabkan oleh banyaknya kasus korupsi yang melibatkan banyak politisi dan pemimpin daerah. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap jumlah partai menurun, hal ini berdampak pada tingkat partisipasi politik dalam pemilu di kalangan masyarakat lokal dan generasi muda.

2. Kurangnya Peran Pemerintah

Negara sebagai pengambil keputusan politik dan penyelenggara pendidikan politik wajib ikut serta mensukseskan program untuk menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Keterlibatan pemerintah tidak hanya melibatkan pengembang dan pelaksana program, namun juga turut serta mendukung program pendidikan politik bagi generasi muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang yang diberikan dalam pelaksanaan pendidikan politik masih minim, dan peran negara sebagai organisator. Unsur-unsur pendukung inilah yang menjadi poin-poin utama yang nantinya akan ditambahkan pada saat kegiatan berlangsung. Minimnya fasilitas yang diberikan membuat pendidikan

Penutup

Implementasi pendidikan politik bagi warga negara dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesadaran politik. Dengan adanya pendidikan politik yang efektif, warga negara dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesimpulan dari implementasi pendidikan politik adalah Pemahaman yang Lebih Baik. Warga negara akan dapat memahami peran mereka dalam proses politik, termasuk hak mereka untuk memilih, serta bagaimana pemerintahan dan lembaga politik beroperasi. Meningkatkan Partisipasi. Pendidikan politik dapat mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, pengambilan keputusan lokal, dan berbagai forum partisipasi publik. Memperkuat Demokrasi. Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi politik, pendidikan politik dapat membantu memperkuat fondasi demokrasi dengan menciptakan warga negara yang lebih terinformasi dan aktif secara politik. Mengurangi Manipulasi Politik. Warga negara yang teredukasi tentang politik cenderung lebih sadar terhadap upaya manipulasi politik dan propaganda, sehingga dapat mengurangi potensi pengaruh buruk dari praktik-praktik semacam itu. Mendorong Dialog Publik yang Sehat. Pendidikan politik juga dapat memfasilitasi pembentukan dialog publik yang sehat, di mana warga negara dapat berdiskusi tentang isu-isu penting dengan landasan pengetahuan yang kuat. Dengan demikian, implementasi pendidikan politik dapat memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik warga negara dan memperkuat partisipasi demokratis dalam masyarakat.

Referensi

- Abby Alfianda, 2022, Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda Di Kabupaten Belitung Timur, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 3, Hal. 117.
- Darmadi, 2014, *Pendidikan dan Pesona Politik*, (Jambi: PT Gramedia).

Edwin Nurdiansyah, 2015, Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol.2 No. 1.

Eko Handoyo, 2017, "*Pendidikan Politik*", (Yogyakarta: Pohon Cahaya).